

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam prosesnya pembangunan ekonomi seharusnya meningkatkan pemasukan total dan pemasukan perkapita berdasarkan pertambahan penduduk diiringi dengan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara. Umumnya pembangunan ekonomi tidak hanya didapati dengan adanya peralihan pada sistem permintaan dan penawaran produksi barang dan jasa. Akan tetapi tanda terjadinya pembangunan ekonomi juga terdapat pada peralihan struktur dan ketenagakerjaan.

Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi (Huda, Dkk, 2017: h 1). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan dari sisi infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia dan dan sumber daya alam. Permasalahan peningkatan taraf hidup masyarakat suatu negara bisa diatasi dengan pembangunan ekonomi. Efek jangka panjang pembangunan ekonomi berdampak pada peningkatan standar hidup, memperbanyak lapangan kerja, pendidikan berkualitas, dan faktor lain seperti jaminan sosial.

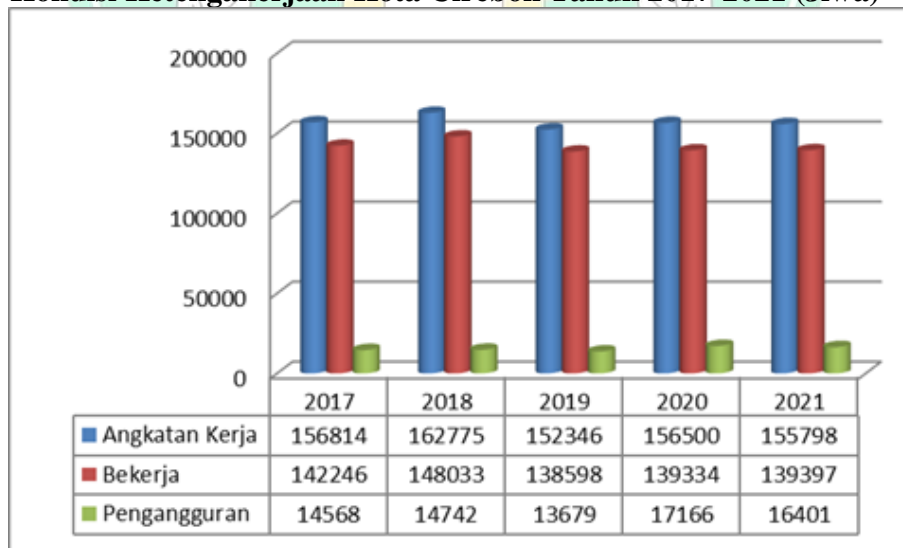
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan perkapita suatu negara dalam kurun waktu yang panjang, dengan melihat jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak ada kesenjangan. (Hasan, Aziz,2019) Sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tercapai namun gagal memperbaiki taraf hidup (kesejahteraan) masyarakatnya.

Permasalahan pemerintah yang saat ini belum dituntaskan adalah masalah ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan lapangan pekerjaan tidak imbang dengan bertambahnya pencari kerja serta jumlah penduduk dan angkatan kerja yang terus bertambah. Maka lapangan kerja yang besar diperlukan untuk menjawab masalah perkembangan penduduk.

Masalah ketenagakerjaan sering dijumpai di negara berkembang seperti Indonesia. Jika kita melihat jumlah angkatan kerja yang terserap tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja maka ada indikator permasalahan tenaga kerja. Pada periode Agustus 2017-2021 angkatan kerja di Indonesia tergolong rentan, menurut badan pusat statistik pada tahun 2017 jumlah pengangguran mencapai 7,4 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 121,42 juta jiwa. Kenaikan jumlah angkatan kerja dan pengangguran juga diikuti pada tahun 2021, angkatan tenaga kerja sejumlah 131, 50 juta jiwa dengan jumlah pengangguran sebesar 9,5 juta jiwa. Sama halnya dengan negara Indonesia kota Cirebon yang merupakan bagian dari Indonesia memiliki keadaan yang hampir sama, meskipun dengan perbandingan yang berbeda dilihat pada tahun 2017-2021. Berikut kondisi ketenaga kerjaan di Kota Cirebon tahun 2017-2021 :

Gambar 1. 1

Kondisi Ketengakerjaan Kota Cirebon Tahun 2017-2021 (Jiwa)



Sumber : BPS Kota Cirebon diambil tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang fluktuatif. Tahun 2017 dan 2018 kota Cirebon mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja dari 156814 naik menjadi 162775 dan berimbas pada tenaga kerja yang terserap, sedangkan tahun 2019-2021 penyerapan tenaga kerja menurun dan naiknya jumlah pengangguran. Seandainya kondisi ini terjadi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan

permasalahan tenaga kerja yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kerawanan sosial.

Faktor penting dalam melakukan reformasi ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), Dalam persaingan global menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing sangatlah penting. Berkaitan dengan hal tersebut, SDM Indonesia memiliki dua hal penting yang harus diperhatikan, Pertama, jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja terjadi kesenjangan, kedua, angkatan kerja dalam hal pendidikan masih relatif rendah. Angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2% (Damanhuri, Findi, 2014).

Permasalahan tenaga kerja merupakan masalah yang kompleks, tidak seimbangnya antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menimbulkan masalah pengangguran. Jika pemerintah tidak mampu meningkatkan lapangan kerja maka terjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga masyarakat. Adanya kebijakan yang dapat mendorong perluasan tenaga kerja perlu dilakukan agar alat-alat dan kebijakan ekonomi efektif untuk mengurangi pengangguran (Indradewa, Natha, 2015 h: 925).

Pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja disebut pasar tenaga kerja, penjual merupakan para pencari kerja dan pembeli adalah individu atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja (Malik, 2016) Pembangunan dan pertumbuhan nasional jika memanfaatkan jumlah tenaga kerja sebagai sumber daya manusia maka bisa meningkatkan laju dari pembangunan dan pertumbuhan nasional. Dalam prospektif konvensional angkatan kerja dan pertumbuhan penduduk dipandang positif sebagai salah satu aspek untuk mempercepat pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Indradewa, Natha, 2015 h: 924). Produk domestik bruto (PDB) pada taraf nasional dan produk domestik regional bruto untuk daerah, seperti provinsi, kabupaten dan kota adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dengan indikator peningkatan produksi barang dan jasa (Trianto, 2017 h: 16). Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang (Kamar, 2017 h: 2).

Pertumbuhan ekonomi dinyatakan oleh Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) perkapita karena menunjukkan tingkat pendapatan individu secara rata-rata (Ezkirianto, Findi 2013 h: 17) Berikut adalah tabel kondisi PDRB perkapita Kota Cirebon ADHK Tahun 2017-2022 :

Tabel 1. 1
PDRB Perkapita Kota Cirebon Atas Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB
2017	47.533,000
2018	50.011,000
2019	53.245,000
2020	50.074,000
2021	50.928,000

Sumber: BPS kota Cirebon diambil tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi perkapita kota Cirebon pada tabel diatas menunjukkan bahwa tiap tahunnya secara keseluruhan terdapat peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2018 PDRB perkapita naik dari 47.533 menjadi 50.011 begitu juga dengan tahun berikutnya naik menjadi 53.245 akan tetapi pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan ke angka 50.074 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan walaupun kecil. Segala pertambahan nilai unit usaha dalam suatu wilayah atau keseluruhan jumlah nilai barang dan jasa oleh seluruh bagian ekonomi suatu wilayah merupakan nilai produk domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Anitasari, Soleh 2015 h: 119). Namun kenyataanya, belum maksimalnya seluruh unit ekonomi menyebabkan

pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada setiap tahunnya di kota Cirebon belum memberikan dampak yang nyata dalam penyerapan tenaga kerja

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Romi, Umiyati 2018). Kebijakan upah minimum merupakan usaha pemerintah dalam mengatasi ketenaga kerjaan. Peningkatan pendapatan perkapita dengan keputusan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat upah berpengaruh terhadap besarnya tenaga kerja yang terserap. Menurut teori kenaikan tingkat upah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan kuantitas tenaga kerja yang menurun. Teori tersebut terbukti disini. Apabila tingkat upah naik, sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Jika kenaikan upah tidak sebanding dengan jumlah yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan daya beli masyarakat maka situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang harganya relatif mahal dengan input-input lain yang harganya relatif lebih murah untuk mempertahankan keuntungan yang maksimum (Lube, Kalangi, Tolosan, 2021 h:28) Berikut adalah besarnya jumlah tingkat upah minimum Kota Cirebon :

Tabel 1. 2
Upah Minimum Kota Cirebon Tahun 2017-2021 (rupiah/bulan)

NO	TAHUN	UMR
1	2017	1.797,163
2	2018	1.893,383
3	2019	2.045,422
4	2020	2.271,201
5	2021	2.271,201

Sumber : Cirebon Satudata diambil tahun 2023

Berdasarkan tabel upah minimum, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan upah sebesar 96.220 rupiah yaitu menjadi 1.893,163 yang sebelumnya

1.797,163, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan upah sebesar 152.039 rupiah menjadi 2.045,422 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 225.779 rupiah. Dari tahun 2017 sampai 2020 kota Cirebon mengalami kenaikan tingkat upah namun pada tahun 2021 upah masih sama seperti tahun 2020 yaitu tetap diangka 2.271.201. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan tiap tahun mempengaruhi kenaikan tingkat upah. kesempatan kerja bisa meningkat ketika tingkat upah naik dengan asumsi konsumsi masyarakat meningkat. Sebaliknya, jika konsumsi dari masyarakat itu tetap, maka penurunan tidak dapat dihindarkan. Imam Buchari (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa upah berkorelasi negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Korelasi negatif bermakna upah berpengaruh tidak searah atau sebaliknya, artinya apabila upah naik, maka penyerapan tenaga kerja berpotensi menurun, terlebih pekerjaan yang produktivitasnya rendah.

Tabel 1. 3
Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan

Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan				
TAHUN	SD	SLTP	SMU	D I/II/III, Universitas
2017	79	94	2.301	434
2018	107	137	2.194	848
2019	100	124	1.734	657
2020	21	63	1.945	305
2021	35.318	19.518	57.921	26.588

Sumber : Cirebon Satudata diambil tahun 2023

Angkatan kerja di Kota Cirebon berdasarkan pendidikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja pada tahun 2021 didominasi oleh pekerja lulusan SMU dengan jumlah 57.921, kemudian lulusan SD dengan jumlah 35.318 dan diurutan ketiga adalah D I/II/III dan perguruan tinggi dengan jumlah 26.588, dan SLTP dengan jumlah 19.518 pada posisi keempat. Dari data tersebut kita mengetahui bahwa tenaga kerja di kota Cirebon didominasi oleh lulusan SMU kebawah.

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas tenaga kerja, artinya pendidikan seseorang berdampak pada produktivitas kerjanya. Tingginya pendidikan yang dimiliki akan meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga dapat terhindar dari kemiskinan (Islami, Anis, 2019 h : 495).

Dari pembahasan masalah di latar belakang, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

Pokok masalah yang diteliti berdasarkan pembahasan latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon tahun 2017-2021 ?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon tahun 2017-2021 ?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon tahun 2017-2021 ?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja secara simultan di kota Cirebon tahun 2017-2021 ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyebar luas dan menyimpang dari tujuan awal penelitian yang sudah direncanakan, penulis menetapkan batasan masalah penelitian, yaitu untuk membahas pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon periode 2017 – 2021.

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon periode 2017-2021
2. Untuk menganalisis apakah upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon periode 2017-2021
3. Untuk menganalisis apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon periode 2017-2021
4. Untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon periode 2017-2021

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penulis : penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang ditempuh dan juga sebagai pengembangan diri dalam menerapkan pengetahuan dan teori yang penulis dapatkan semasa perkuliahan.
- b. Untuk pemerintah : diharapkan memberikan informasi tentang penyerapan tenaga kerja di kota Cirebon dan faktor apa saja yang berkorelasi.
- c. Untuk akademisi : menambah pengetahuan mengenai ketenaga kerjaan dan pengkajian untuk penelitian selanjutnya.